

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diberlakukannya peraturan perundang-undangan tentang diberlakukannya otonomi daerah yang berasas desentralisasi, maka Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang lebih luas. Seperti yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 BAB III Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantu.

Untuk mendukung terselenggarakannya otonomi daerah yang optimal maka diberlakukannya perimbangan keuangan yang diatur melalui UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan terdiri dari tiga yaitu : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan perekonomian daerahnya masing-masing. Prinsip dasar pemberian otonomi dimaksud berdasarkan atas daerahlah yang mengetahui kebutuhan bagi daerahnya. Maka dengan pemberian otonomi diharapkan daerah mampu lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut *Kuncoro (1995 : 334-358)* Dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membiayai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Melihat pembangunan ekonomi DIY telah menunjukkan kemajuan Yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pengeluaran pemerintah, peningkatan PDRB, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan peningkatan investasi PMDN.

Tabel 1.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2008-2012

Tahun	PAD (Dalam Jutaan Rupiah)
2008	632.872.312
2009	645.145.551
2010	740.202.076
2011	867.112.885
2012	800.156.498

Sumber : BPS Prov. DIY

Dari Tabel 1.1 dapat dijelaskan PAD Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 PAD sebesar Rp. 632.872.312 juta meningkat sebesar Rp. 645.145.551 juta pada tahun 2009. Sedangkan pada tahun 2011 PAD sebesar Rp. 867.112.885 juta mengalami penurunan sebesar Rp.800.156.498 pada tahun 2012. Namun dengan peningkatan dan penurunan tidak memberikan dampak yang terlalu signifikan dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Bagi daerah indikator ini sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arus pembangunan dimasa yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator yang seringkali digunakan dalam melihat sumber daya yang

dimiliki oleh suatu daerah adalah aspek ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai penopang kekuatan dan kelemahannya (Sukirno, 2004)

Tabel 1.2
PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta atas dasar Harga Konstan
Tahun 2008-2012

Tahun	PDRB (Dalam Jutaan Rupiah)
2008	19.212.481
2009	20.064.257
2010	21.014.042
2011	22.129.707
2012	23.309.218

Sumber : BPS Prov. DIY

Tabel 1.2 dapat dijelaskan PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta atas harga konstan. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 19.212.481 juta meningkat sebesar Rp. 20.064.257 juta pada tahun 2009 dan pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 23.309.218 juta. PDRB Daerah Istimewah Yogyakarta tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 1.3
Pengeluaran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2008-2012

Tahun	Pengeluaran Pemerintah Daerah (Jutaan Rupiah)
2008	1.795.670.310
2009	1.571.892.164
2010	1.630.773.451
2011	1.859.142.795
2012	2.156.863.309

Sumber : BPS Prov. DIY

Dari Tabel 1.3 dapat dijelaskan Pengeluaran Belanja Pemerintah mengalami fluktuasi atau naik turun. Pada tahun 2008 pengeluaran pemerintah sebesar Rp.1.795.670.310 mengalami penurunan sebesar Rp.1.571.892.164 pada tahun

2009. Sedangkan pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.859.142.795 meningkat sebesar Rp. 2.156.863.308 pada tahun 2012. Pengeluaran pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dan penurunan hal ini didasarkan atas kebutuhan fiskal Daerah.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2009 – 2013

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
2009	3.501.869
2010	3.457.491
2011	3.487.325
2012	3.514.762
2013	3.594.854

Sumber : BPS Prov. DIY

Jumlah penduduk mengalami penurunan dan peningkatan, terlihat dari tabel 1.4. Tahun 2009 sebesar 3.501.869 jiwa mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 menjadi 3.457.491 jiwa dan 3.487.325 jiwa. Sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 mengalami peningkatan menjadi 3.514.762 jiwa dan 3.594.854 jiwa.

Penelitian ini akan difokuskan pada masalah faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan visi misi pembangunan bidang ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu perekonomian yang maju didalam masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, yang dapat diukur salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi dengan dimbangi kualitas hidup mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan ditunjang oleh kemampuan sumber daya dan daya dukung yang lebih intensif dapat dilihat melalui proporsi jumlah penduduk, pengeluaran pemerintah, PDRB dan investasi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan kunci pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD, semakin besar kontribusi yang diberikan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Maka penelitian ini dibuat dengan memilih judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan ditelaah penelitian ini yang diantaranya :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ?
4. Bagaimana pengaruh PMDN terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- d. Menganalisis pengaruh PMDN terhadap Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3.2 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. Data dan informasi dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang serupa.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai Pendapatan Asli Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Sistematika Penulisan

1. Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penelitian.

2. Bab II : Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Berisikan kajian pustaka dari penelitian – penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan landasan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan yang akan diteliti serta teori – teori yang

dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan beberapa variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian.

3. Bab III : Metode Penelitian

Berisikan jenis dan cara pengumpulan data yang dilakukan, definisi operasional variabel dan metode analisis yang dilakukan dalam penelitian.

4. Bab IV. Hasil dan Analisis

Memaparkan pengujian atas data penelitian yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta pembahasan lebih lanjut hasil penelitian dan hasil analisis data.

5. Bab V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran merupakan bagian yang menyimpulkan secara keseluruhan dari hasil penelitian serta menjelaskan secara lengkap implikasi yang didapat dan secara langsung menjadi bentuk jawaban atas pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.